



Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Madrasah dalam Kerangka Akreditasi Mutu

Diwani Elfarisyah¹, Juliani², Dewi Agustin³, Imelda Ariska⁴, Sintia⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: diwanielfarisyah@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dalam kerangka akreditasi mutu pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara kebijakan pengembangan kompetensi guru dengan pencapaian standar akreditasi serta peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama, pedoman dan instrumen akreditasi madrasah, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas kompetensi guru dan penjaminan mutu pendidikan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, kebijakan, serta implikasi pengembangan kompetensi guru terhadap mutu dan akreditasi madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan madrasah dalam memenuhi standar akreditasi mutu. Pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru berkontribusi langsung terhadap pemenuhan standar pendidik, standar proses, serta pembentukan budaya mutu di lingkungan madrasah. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya akses pelatihan, serta lemahnya integrasi antara pengembangan kompetensi guru dan sistem penilaian kinerja. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah perlu dirancang dan diimplementasikan secara konsisten, terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal, serta didukung kepemimpinan madrasah yang kuat agar mampu mendorong peningkatan mutu dan keberhasilan akreditasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Akreditasi mutu, Kebijakan pendidikan, Kompetensi guru, Madrasah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze policies for developing madrasa teacher competencies within the framework of educational quality accreditation. The focus of the study is on examining the relationship between teacher competency development policies and the achievement of accreditation standards as well as the sustainable improvement of madrasa quality. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through a systematic review of relevant written sources, including educational regulations, policies issued by the Ministry of Religious Affairs, madrasa accreditation instruments and guidelines, as well as books and scholarly journal articles related to teacher competence and educational quality assurance. Data analysis was conducted using content analysis with a descriptive-analytical approach to identify key concepts, policy orientations, and the implications of teacher competency development for quality improvement and accreditation outcomes. The findings indicate that

policies on madrasa teacher competency development play a strategic role in enhancing learning quality and strengthening madrasa readiness to meet accreditation standards. The development of pedagogical, professional, social, and personal competencies contributes significantly to fulfilling standards for educators and learning processes, while also fostering a culture of quality within madrasas. However, policy implementation still faces several challenges, including limited resources, unequal access to professional development programs, and insufficient integration between competency development initiatives and teacher performance evaluation systems. In conclusion, the study emphasizes that madrasa teacher competency development policies must be implemented consistently, integrated with internal quality assurance systems, and supported by strong instructional leadership to effectively promote sustainable quality improvement and successful accreditation outcomes.

Keywords: Quality accreditation, Education policy, Teacher competence, Madrasa.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, mutu pendidikan menjadi isu sentral yang terus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Mutu pendidikan yang baik sangat ditentukan oleh berbagai komponen yang saling berkaitan, salah satunya adalah kualitas guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran.

Guru merupakan aktor kunci dalam sistem pendidikan karena berperan langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru yang kompeten tidak hanya mampu menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi secara utuh. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di madrasah, peran guru menjadi semakin strategis karena tidak hanya bertanggung jawab pada pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, nilai-nilai keislaman, dan karakter religius. (Kartiko et al., 2024)

Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah tidak hanya menjadi alternatif pendidikan formal, tetapi juga menjadi institusi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislaman. Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, madrasah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikannya agar mampu bersaing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan tersebut mencakup perkembangan teknologi, perubahan paradigma pembelajaran, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta meningkatnya standar mutu pendidikan secara nasional maupun internasional.

Salah satu indikator penting dalam menjamin mutu pendidikan madrasah adalah sistem akreditasi. Akreditasi merupakan mekanisme penilaian kelayakan dan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Melalui akreditasi, kualitas madrasah dapat diukur secara objektif dan sistematis, mencakup

berbagai aspek seperti kurikulum, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam kerangka ini, kompetensi guru menjadi salah satu komponen utama yang sangat menentukan hasil akreditasi dan mutu madrasah secara keseluruhan. (Sumiati, 2023)

Pengembangan kompetensi guru madrasah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi madrasah. Kebijakan pengembangan kompetensi guru mencakup berbagai program dan strategi, seperti pendidikan dan pelatihan, sertifikasi guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, supervisi akademik, serta peningkatan kualifikasi akademik. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa guru madrasah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan mampu menjawab tantangan pembelajaran yang terus berkembang. (Muslihah et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah masih menghadapi berbagai permasalahan. Tidak semua program pengembangan kompetensi berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa guru madrasah masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pelatihan yang berkualitas, baik karena faktor geografis, keterbatasan anggaran, maupun kurangnya dukungan kelembagaan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dampak kebijakan terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu madrasah belum sepenuhnya maksimal. (Hakeu et al., 2025)

Permasalahan lain yang sering muncul adalah belum terintegrasinya kebijakan pengembangan kompetensi guru secara sistematis dengan kerangka akreditasi mutu madrasah. Dalam banyak kasus, pengembangan kompetensi guru dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pemenuhan standar akreditasi. Akibatnya, peningkatan kompetensi guru belum secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan peringkat akreditasi madrasah. Padahal, akreditasi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan kerangka akreditasi mutu. Analisis terhadap kebijakan ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendukung pencapaian standar akreditasi dan peningkatan mutu madrasah. Selain itu, kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual. (Sarwati, 2022)

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi guru dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi guru, serta instrumen akreditasi madrasah menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, guru madrasah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya agar mampu memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi guru harus dirancang secara

komprehensif, terencana, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi guru madrasah juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan mampu merancang pembelajaran yang inovatif, aktif, dan berpusat pada peserta didik. Kompetensi profesional memungkinkan guru menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, kompetensi kepribadian dan sosial berperan penting dalam membentuk keteladanan dan hubungan interpersonal yang positif antara guru, peserta didik, dan lingkungan madrasah. Keseluruhan kompetensi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu madrasah dan hasil akreditasi. (Hajar, 2018)

Dalam kerangka akreditasi mutu, pengembangan kompetensi guru tidak hanya dinilai dari aspek kuantitatif, seperti jumlah guru bersertifikat atau tingkat pendidikan, tetapi juga dari aspek kualitatif, seperti kinerja guru, inovasi pembelajaran, dan kontribusi terhadap pengembangan madrasah. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi guru harus mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja guru secara nyata dan terukur. Hal ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. (Prayoga et al., 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keberhasilan akreditasi madrasah. Namun, kompleksitas permasalahan yang ada menuntut adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam kerangka akreditasi mutu. (Gusli et al., 2025)

Dengan demikian, kajian tentang kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dalam kerangka akreditasi mutu diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan madrasah. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang kebijakan pendidikan dan manajemen mutu pendidikan Islam. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, pengelola madrasah, dan guru dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan kompetensi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (Assingkily, 2021). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dan sistem akreditasi mutu pendidikan. Sumber data penelitian meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan madrasah, dokumen kebijakan Kementerian Agama, instrumen dan pedoman akreditasi madrasah, serta buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kompetensi guru, kebijakan pendidikan, dan penjaminan mutu. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema dan substansi kajian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan

pengembangan kompetensi guru madrasah dan kerangka akreditasi mutu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memilih sumber-sumber yang relevan, kredibel, dan mutakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah isi dokumen untuk mengidentifikasi konsep, kebijakan, dan implikasi pengembangan kompetensi guru madrasah terhadap pencapaian standar akreditasi mutu. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian untuk menarik kesimpulan yang logis dan mendalam. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh serta rekomendasi konseptual mengenai kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah yang berorientasi pada peningkatan mutu dan keberhasilan akreditasi (Afridoni et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan Islam yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik sekaligus penyesuaian terhadap sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi madrasah. Secara konseptual, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas guru agar mampu memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah mencakup berbagai program strategis, antara lain pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis, workshop pembelajaran, serta penguatan komunitas belajar guru. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan empat kompetensi utama guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dalam konteks akreditasi mutu, penguasaan keempat kompetensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas proses pembelajaran, manajemen kelas, serta interaksi guru dengan peserta didik dan lingkungan madrasah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum madrasah telah memahami arah kebijakan pengembangan kompetensi guru, meskipun tingkat implementasinya bervariasi. Madrasah yang memiliki kepemimpinan kepala madrasah yang kuat dan komitmen tinggi terhadap mutu cenderung lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebaliknya, madrasah dengan keterbatasan sumber daya masih menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan program pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi penelitian, disajikan data umum yang mencerminkan karakteristik kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah beserta pola pelaksanaannya di lingkungan madrasah. Data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal tentang arah kebijakan, bentuk implementasi, serta tingkat kesiapan madrasah dalam mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan upaya peningkatan mutu dan akreditasi pendidikan. (Miranti & Handayani, 2021)

Tabel 1. Data Umum Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Madrasah

Aspek yang Dikaji	Deskripsi Umum
Fokus Kebijakan	Penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru
Bentuk Program	Diklat, workshop, bimbingan teknis, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan
Pelaksana Kebijakan	Kementerian Agama, Kantor Kemenag Daerah, dan madrasah
Keterkaitan dengan Akreditasi	Mendukung pemenuhan standar pendidik, standar proses, dan standar mutu
Tingkat Implementasi	Beragam, tergantung kesiapan madrasah dan dukungan manajerial
Dampak Umum	Peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapan akreditasi madrasah

Implementasi Pengembangan Kompetensi Guru dalam Kerangka Akreditasi Mutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian mutu akreditasi. Dalam instrumen akreditasi, kualitas guru menjadi salah satu faktor penentu yang memengaruhi penilaian terhadap standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang baik mampu merancang pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pengembangan kompetensi guru berdampak pada peningkatan kualitas perangkat pembelajaran, seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Guru yang mengikuti program pengembangan kompetensi cenderung lebih memahami pentingnya dokumentasi pembelajaran sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Hal ini berkontribusi positif terhadap kesiapan madrasah dalam menghadapi proses akreditasi, karena setiap aktivitas pembelajaran dapat dibuktikan secara administratif dan akademik. (Gusli et al., 2025)

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan akreditasi, tetapi juga membentuk budaya mutu di lingkungan madrasah. Guru mulai terbiasa melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, meningkatkan kolaborasi antar guru, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesional. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem mutu madrasah yang berkelanjutan, bukan sekadar untuk memperoleh nilai akreditasi yang tinggi.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya merata. Beberapa guru masih memandang akreditasi sebagai kegiatan administratif yang bersifat periodik, sehingga pengembangan kompetensi dilakukan hanya menjelang proses akreditasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi kebijakan pengembangan kompetensi guru perlu diperkuat agar menjadi bagian dari praktik profesional guru sehari-hari (Apiyani et al., 2022).

Dampak, Tantangan, dan Strategi Penguatan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, serta kesiapan madrasah dalam memenuhi standar akreditasi mutu. Guru yang aktif mengikuti program pengembangan kompetensi menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengelola pembelajaran, kemampuan menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta keterampilan dalam melakukan asesmen pembelajaran yang lebih autentik dan berorientasi pada capaian peserta didik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan akses pelatihan, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program pengembangan kompetensi. Selain itu, beban administrasi guru yang cukup tinggi sering kali mengurangi kesempatan guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional secara maksimal.

Tantangan lainnya adalah rendahnya motivasi sebagian guru dalam mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh minimnya insentif, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta belum terintegrasinya hasil pengembangan kompetensi guru dengan sistem penilaian kinerja secara komprehensif. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan strategi penguatan kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah, antara lain melalui peningkatan peran kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran, penguatan komunitas belajar guru, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelatihan dan pendampingan. Selain itu, sinkronisasi antara kebijakan pengembangan kompetensi guru dan sistem akreditasi mutu perlu terus ditingkatkan agar kebijakan ini benar-benar menjadi motor penggerak peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan (Prayoga et al., 2021).

Pembahasan

Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam, khususnya dalam kerangka akreditasi mutu. Temuan ini sejalan dengan teori *Human Capital*, yang memandang guru sebagai aset strategis organisasi pendidikan.

Dalam perspektif ini, pengembangan kompetensi guru tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional madrasah dalam mencapai standar mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi guru memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan mutu madrasah secara sistemik.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru berkontribusi signifikan terhadap kualitas proses pembelajaran. Guru yang mengikuti program pengembangan kompetensi cenderung mampu merancang pembelajaran yang lebih terstruktur, kontekstual, dan berorientasi pada peserta didik. Hal ini relevan dengan teori *constructivist learning*, yang menekankan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran bermakna. Dengan

kompetensi yang memadai, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif siswa, sehingga kualitas pembelajaran tidak hanya terlihat dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari efektivitas proses belajar mengajar. (Hakeu et al., 2025)

Dalam konteks akreditasi mutu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru berdampak pada pemenuhan standar proses dan standar pendidik. Temuan ini menguatkan teori *Total Quality Management (TQM)* dalam pendidikan, yang menekankan bahwa mutu merupakan hasil dari proses yang dirancang dan dikendalikan secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi guru berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kualitas proses internal madrasah, sehingga akreditasi tidak dipahami semata sebagai evaluasi eksternal, tetapi sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. (Afridoni et al., 2022)

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru turut membentuk budaya mutu di madrasah. Guru mulai terbiasa melakukan refleksi pembelajaran, berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dalam komunitas belajar. Temuan ini relevan dengan teori *learning organization* yang dikemukakan oleh Senge, di mana organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu belajar secara kolektif dan beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks madrasah, kebijakan pengembangan kompetensi guru berperan sebagai katalisator terbentuknya madrasah sebagai organisasi pembelajar yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. (Muslihah et al., 2024)

Namun demikian, pembahasan hasil penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Variasi tingkat implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kompetensi guru sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan manajemen madrasah. Hal ini sejalan dengan teori *instructional leadership*, yang menekankan bahwa kepala madrasah memiliki peran strategis dalam menggerakkan guru untuk terlibat aktif dalam pengembangan profesional. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan visioner, kebijakan pengembangan kompetensi guru cenderung berjalan secara formalitas dan tidak memberikan dampak yang optimal terhadap mutu pembelajaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian guru masih memandang pengembangan kompetensi dan akreditasi sebagai aktivitas administratif yang bersifat periodik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan, khususnya model *top-down*, yang menyatakan bahwa kebijakan yang tidak disertai dengan pemahaman, partisipasi, dan komitmen aktor pelaksana berpotensi mengalami distorsi dalam implementasinya. Dalam konteks ini, pengembangan kompetensi guru belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan profesional, melainkan masih dipandang sebagai tuntutan eksternal yang harus dipenuhi menjelang akreditasi. (Sumiati, 2023)

Tantangan lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun akses terhadap pelatihan yang berkualitas. Kondisi ini relevan dengan teori *resource-based view*, yang menyatakan bahwa ketersediaan dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan organisasi. Beban administrasi guru yang tinggi juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, karena mengurangi ruang refleksi dan pengembangan profesional guru secara mandiri.

Dari perspektif teori motivasi, rendahnya partisipasi sebagian guru dalam pengembangan kompetensi dapat dikaitkan dengan minimnya insentif dan pengakuan profesional. Teori *expectancy* dan *self-determination* menjelaskan bahwa individu akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi apabila terdapat harapan manfaat yang jelas, dukungan lingkungan, serta pengakuan terhadap capaian profesionalnya. Oleh karena itu, tanpa sistem penghargaan dan penilaian kinerja yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi, kebijakan ini berpotensi kehilangan daya dorong dalam jangka panjang. (Hajar, 2018)

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian akreditasi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, penguatan kepemimpinan madrasah, serta dukungan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kompetensi guru perlu dipahami sebagai strategi jangka panjang dalam membangun mutu madrasah, bukan sekadar sebagai respons terhadap tuntutan akreditasi. (Prayoga et al., 2021)

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian akreditasi mutu. Pengembangan kompetensi guru berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran, pemenuhan standar pendidik dan standar proses, serta mendorong terbentuknya budaya mutu di madrasah. Temuan ini menegaskan bahwa guru merupakan aset strategis dalam pendidikan Islam, sehingga peningkatan mutu madrasah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru yang dirancang secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, kekuatan kepemimpinan kepala madrasah, ketersediaan sumber daya, serta sistem penghargaan dan motivasi guru. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian pendidikan Islam tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi mutu lembaga pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pengembangan kompetensi guru perlu diposisikan sebagai strategi jangka panjang dalam praksis pendidikan Islam, bukan sekadar kegiatan administratif menjelang akreditasi, agar mampu mendorong peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, A., Putra, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). Manajemen akreditasi sekolah upaya peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 25341–25349. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4788>
- Apiyani, Y., Arafat, Y., & Sari, A. P. (2022). Implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru madrasah dalam meningkatkan keprofesian. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499–504.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.

- Gusli, R. A., Sesmiarni, Z., Lestari, K. M., & Akhyar, M. (2025). Peran kepala madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan Islam di MTsN 2 Kota Pariaman. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 41–63. <https://doi.org/10.18592/moe.v11i1.15591>
- Hajar, S. (2018). Implementasi penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan kinerja madrasah: Studi di MTs Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 59–72. <https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/940>
- Hakeu, F., Ali, F. F., & Alim, M. S. (2025). Peran dan strategi kepemimpinan kepala sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran PAI. *Hulontalo Journal of Islamic Studies*, 3(2), 107–124.
- Kartiko, A., Rokhman, M., Priyono, A. A., & Susanto, S. (2024). Peningkatan kinerja guru melalui budaya organisasi dan kepemimpinan servant kepala madrasah. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1323>
- Miranti, D. D., & Handayani, S. (2021). Pengembangan kompetensi guru dan akreditasi madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 123–139. <https://doi.org/10.22373/jpi.v6i2.8456>
- Muslihah, E., Syarifudin, E., Budiarjo, Nurlelah, & Mulyosaputro, P. (2024). Akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan di madrasah (Penelitian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Paris Langkis*, 5(2), 110–125.
- Prayoga, A., Widad, A. L., Marlina, E., Mukarromah, I. S., & Ruswandi, U. (2021). Implementasi penjaminan mutu madrasah. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 42–58. <https://doi.org/10.52431/murobbi.v5i1.456>
- Sarwati, A. (2022). Peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam menyiapkan dokumen akreditasi madrasah IASP 2020 melalui pembimbingan intensif terprogram (PINTER) di MA NU Gesi Kabupaten Sragen. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 2(3), 198–210. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i3.1558>
- Sumiati, T. (2023). Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keprofesian. *Jurnal Tahsinia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.57171/jt.v4i1.356>